

LAPORAN KINERJA

Triwulan II



Stasiun KIPM BAUBAU
2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Baubau (SKIPM Baubau) ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian Isi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2024 adalah Rencana Strategis SKIPM Baubau (Renstra SKIPM Baubau) Tahun 2020-2024 dan Target Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2024 beserta realisasinya.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Baubau di masa mendatang.

Baubau, Juli 2024
Kepala SKIPM Baubau



YUNI IRAWATI WIJAYA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
2 PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 VISI DAN MISI	4
2.2 SASARAN KINERJA	5
3 AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1 CAPAIAN KINERJA	7
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	8
3.3 REALISASI ANGGARAN	19
4. PENUTUP	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Baubau 2024	3
---	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2024	5
Tabel 2.	Rincian Rencana Kerja dan Anggaran SKIPM Baubau Tahun 2024	6
Tabel 3.	Capaian Kinerja SKIPM Baubau Triwulan II Tahun 2024	7
Tabel 4.	Capaian IKU1. Jumlah Sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Baubau.....	9
Tabel 5.	Capaian IKU2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup SKIPM Baubau.....	9
Tabel 6.	Capaian IKU3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produkpad UPI lingkup SKIPM Baubau	11
Tabel 7.	Capaian IKU4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	12
Tabel 8.	Capaian IKU5. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Baubau	13
Tabel 9.	Capaian IKU6. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau.....	14
Tabel 10.	Capaian IKU7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Baubau.....	15
Tabel 11.	Capaian IKU8. Presentase Penyelesaian temuan BPK lingkup SKIPM Baubau	15
Tabel 12.	Capaian IKU9. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau	16
Tabel 13.	Capaian IKU10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Baubau	18
Tabel 14.	Capaian IKU11. Nilai Kinerja Anggaran lingkup SKIPM Baubau	18



Tabel 15. Capaian IKU12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Baubau.....	19
Tabel 16. Capaian IKU13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Baubau	19
Tabel 17. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2024	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Baubau .	23
Lampiran 2. Rincian Target Indikator Kinerja	26
Lampiran 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024	28
Lampiran 4. Tangkapan Layar Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ... dari Aplikasi SIDAK	29
Lampiran 5. Tangkapan Layar www.kinerjaku.kkp.go.id	30
Lampiran 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	31
Lampiran 7. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Baubau (Indeks).....	32
Lampiran 8. Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)	33



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Baubau merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Baubau dituntut untuk melaksanakan secara, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Baubau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Baubau. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, SKIPM Baubau mempunyai tugas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan mutu hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Baubau menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- b) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
- c) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- d) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- e) pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum dan Jabatan Fungsional yang terdiri dari 8 orang fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan (7 orang PNS dan 1 orang PPPK), 1 orang Fungsional



APK APBN, 2 orang Fungsional Umum, 10 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 4 orang pegawai PJLP.

STRUKTUR ORGANISASI SKIPM BAUBAU TAHUN 2024



Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Baubau 2024



PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Aspek yang berkaitan dengan visi KKP sesuai dengan mandat yang diberikan kepada BPPMHKP adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu BPPMHKP menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020 - 2024, yaitu : “Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman dan Terpercaya”

Misi yang diemban oleh BPPMHKP untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional dengan cara melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan serta menjamin mutu hasil perikanan nasional.



2.2. SASARAN KINERJA

Untuk mendukung tercapainya tujuan BPPMHKP, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP, SKIPM Baubau menetapkan Sasaran Kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup SKIPM Baubau (sertifikat)	3
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup SKIPM Baubau(Lokasi)	2
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Baubau (produk)	10
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Baubau(UPI)	2
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Baubau (nilai)	84
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP				
SK3. 1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Baubau (Indeks)	86
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Baubau	82



		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Baubau (%)	100
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau (%)	80
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	93.76
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	82
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Baubau (%)	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHPK Lingkup SKIPM Baubau (%)	80

Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **3.645.714.000,-** (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*).

Tabel 2. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran SKIPM Baubau Tahun 2024 .

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	196.900.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	206.500.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.242.314.000
Total Anggaran SKIPM Baubau Tahun 2024		3.645.714.000



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Baubau Triwulan II 2024 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **114.25 %**, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama 2024.

Tabel 3. Capaian Kinerja SKIPM Baubau Triwulan II Tahun 2024

				Target 2024	Realisasi TW 2
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK1. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup SKIPM Baubau (sertifikat)	3	4
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup SKIPM Baubau(Lokasi)	2	0
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Baubau (produk)	10	0
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Baubau(UPI)	2	0
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK2. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Baubau (nilai)	84	91.79



Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP

SK3. 1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Baubau (Indeks)	86	88,32
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Baubau	82	0
		8	Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Baubau (%)	100	0
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau (%)	80	100
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	93,76	93,25
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	82	0
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Baubau (%)	80	0
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Baubau (%)	80	0

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IK 1. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan Lingkup SKIPM Baubau (Sertifikat)

Sertifikat CPIB supplier adalah kegiatan untuk memastikan bahwa suatu unit supplier menerapkan persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (*standard sanitation operating procedure*) dan cara berproduksi yang baik (*good manufacturing practices*) serta menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan konsepsi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP).



Tabel 4. Capaian IK 1. Jumlah Sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan	3	4	120

Capaian untuk Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan adalah sertifikat yang diterbitkan untuk supplier/miniplan yang menerapkan dan memenuhi Cara Penanganan atau Pengolahan Ikan yang Baik. Untuk Triwulan II, capaian telah terealisasi sebanyak 4 (empat) sertifikat dari target 3 (tiga) sertifikat dengan persentase sebesar **120%**.

IK 2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup SKIPM Baubau (Lokasi)

Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Kegiatan ini dilaksanakan pada sentra penyedia pangan sehat di pasar tradisional.

Tabel 5. Capaian IK 2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Pengawasan mutu hasil perikanan domestik	0	0	0

Pada Triwulan II kegiatan ini tidak ada realisasi dikarenakan kegiatan ini telah dilaksanakan pada Triwulan I dengan target yaitu 2 (dua) lokasi dengan lokus di Kota Baubau dan di Kabupaten Buton. Di Kota Baubau kegiatan ini dilaksanakan di Pasar dan PPI Wameo, Pasar Karya Nugraha dan Pasar Lowu-lowu. Sedangkan



pelaksanaan di Kabupaten Buton dilakukan di Pasar Takimpo dan Pasar Sabho.

IK 3. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Baubau (Produk)

Sebagai bentuk pengendalian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan oleh UPI maka BPPMHKP selaku Otoritas Kompeten menerbitkan Sertifikat Penerapan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point yang selanjutnya disebut sebagai Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJMKHP pada setiap UPI. Persyaratan SJMKHP meliputi program persyaratan dasar (PPD), persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau diolah oleh UPI. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan keluaran dari kegiatan penilaian kesesuaian melalui inspeksi penerapan persyaratan SJMKHP dan pemeriksaan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian di UPI sesuai dengan ruang lingkup yang di sertifikasi. Hasil inspeksi dievaluasi oleh tim teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan SJMKHP yang dilakukan oleh UPI. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan monitoring dan evaluasi ditahun pertama masa berlaku sertifikat.



Tabel 6. Capaian IK 3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Baubau	0	0	0

Untuk Triwulan II, capaian IKU 3. Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Baubau belum terealisasi dikarenakan di tahun 2024 ini pelaksanaan kegiatan ini ditargetkan pada Triwulan IV yaitu di Bulan Oktober 2024 dengan kegiatan monitoring dan evaluasi Sertifikat HACCP pada Unit Pengolahan Ikan PT. Arta Mina Jaya di Kabupaten Wakatobi dan PT. Triko Bina Nusantara Pasarwajo di Kabupaten Buton.

IK 4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan ditataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan adalah kegiatan surveilan GMP/SSOP dan HACCP UPI serta pengambilan contoh dalam rangka official control.

Kegiatan surveilan dilakukan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan



persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Hasil dari kegiatan surveilan akan menjadi dasar dalam penerbitan HC. Kegiatan surveilan dilakukan secara periodik sesuai dengan grade UPI, yaitu grade A dilakukan 2 (dua) kali, grade B dilakukan 3 (tiga) kali dan grade C dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Keluaran dari kegiatan surveilan ini adalah berupa Surat Keterangan Hasil Surveilan (SKHS). Kegiatan Pengambilan Contoh dilakukan dengan ketentuan grade A paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, grade B paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dan grade C paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Tabel 7. Capaian IK 4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	0	0	0

Target kinerja untuk indikator ini adalah jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor. Pada Tahun 2024 Triwulan II ini tidak ada target untuk IKU ini. Target untuk IKU ini ada di Triwulan I, Triwulan III dan Triwulan IV dengan target Jumlah UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebanyak 2 (dua) UPI.



Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IK 5. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Baubau

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 8. Capaian IK 5. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Baubau	84	91,79	109,27 SANGAT BAIK

Untuk Triwulan II ini, SKIPM Baubau mendapatkan nilai IKM sebesar 91,79 dari target sebesar 84, sehingga dapat disimpulkan



SKIPM Baubau memperoleh nilai **SANGAT BAIK (109,27%)** dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya semoga kedepannya nilai ini dapat dipertahankan bahkan bila perlu ditingkatkan karena semakin tinggi nilainya berarti kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima semakin baik.

IK 6. Indeks Profesional ASN lingkup SKIPM Baubau

Pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN. Kriteria pengukuran indeks profesionalitas ASN mencakup: - Dimensi Kualifikasi - Dimensi Kompetensi - Dimensi Kinerja - Dimensi Disiplin. Pada Tahun 2024, target indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau sebesar 86 % dan pengukurannya akan dilakukan setiap semester dalam setiap tahunnya.

Tabel 9. Capaian IK 6. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau	81	88,32	111

Pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN. Kriteria pengukuran indeks profesionalitas ASN mencakup: - Dimensi Kualifikasi - Dimensi Kompetensi - Dimensi Kinerja - Dimensi Disiplin. Pada Tahun 2024, target indeks profesionalitas ASN tahunan lingkup UPT SKIPM Baubau sebesar **86** dan target untuk Triwulan II atau Semester 1 adalah **81**. Sedangkan



hasil pengukurannya untuk Triwulan II atau Semester I ini adalah sebesar **89,91** sehingga persentase realisasi terhadap target adalah sebesar **111%**

IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Baubau

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Baubau (data capaian dan pelaporan) kinerja satker SKIPM Baubau dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek yaitu kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian. Bobot untuk setiap komponen dalam penilaian setiap rekonsiliasi kinerja adalah sebagai berikut : - Kepatuhan sebesar 30% - Kesesuaian sebesar 30 % - Ketercapaian sebesar 40%.

Tabel 10. Capaian IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Baubau	0	0	0

Untuk capaian IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Baubau ini adalah capaian tahunan sehingga nilai akan ada pada triwulan IV.

IK 8. Persentase Penyelesaian temuan BPK Lingkup SKIPM Baubau

Batas temuan tertinggi nilai temuan LHP BPK adalah dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait perbaikan kinerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 11. Capaian IK 8. Presentase Penyelesaian temuan BPK lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Presentase Penyelesaian temuan BPK lingkup SKIPM Baubau	0	0	0

Pada kurun waktu pelaporan tidak ada pemeriksaan oleh BPK



sehingga realisasi untuk Presentase Penyelesaian temuan BPK lingkup SKIPM Baubau adalah 0

IK 9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Baubau

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (baik bentuk LHP Audit, Relu dan Evaluasi) yang terbit pada Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP menjadi objek pengawasan. Indikator persentase hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat

$$\%_{kasus} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Jenderal KKP yang diberikan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Keterangan :

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan

Target indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar **80 %** dengan realisasi di Triwulan II sebesar **100 %** sehingga persentase capaian terhadap target sebesar **120%**.



Tabel 12. Capaian IK 9. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau	80	100	120

IK10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Baubau

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Nilai Indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai alat ukur untuk menentukan kualitas tingkat kinerja dari sisi kesesuaian perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NK = (I \times W_I) + (CH \times W_{CH})$$

dengan

$$I = (P \times W_P) + (K \times W_K) + (PK \times W_{PK}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan:

NK : Nilai kinerja

I : Nilai aspek implementasi



P : Penyerapan anggaran
 K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
 PK : Pencapaian keluaran
 NE : Nilai efisiensi
 CH : Capaian hasil
 WI : Bobot aspek implementasi
 WCH : Bobot capaian hasil
 WP : Bobot penyerapan anggaran
 WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi
 WPK : Bobot pencapaian keluaran
 WE : Bobot efisiensi

Tabel 13. Capaian IK 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Baubau	83	93,25	112,35

Nilai capaian untuk IK 10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Baubau ini adalah capaian semesteran dan tahunan sehingga akan ada realisasi pada triwulan II dan IV dengan target tahunan **93,76**. Capaian Nilai IKPA Semester I adalah sebesar **93,25** dari target semester I sebesar **83** sehingga persentasenya sebesar **112,35%**

IK 11. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Baubau

Nilai Kinerja Anggaran adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah berorientasi pada anggaran. Penilaian Kinerja Anggaran dapat dilihat dari realisasi aplikasi OMSPAN kementerian keuangan yang menyajikan anggaran yang telah dikeluarkan Surat Perintah Pembayaran oleh KPPN.



Tabel 14. Capaian IK 11. Nilai Kinerja Anggaran lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Nilai Kinerja Anggaran lingkup SKIPM Baubau	0	0	0

Nilai capaian untuk IK 11. Nilai Kinerja Anggaran lingkup SKIPM Baubau ini merupakan capaian tahunan sehingga akan ada realisasi pada triwulan IV.

IK12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Baubau

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa pada SKIPM baubau telah dilaksanakan sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Tabel 15. Capaian IK 12. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Baubau	0	0	0

Sesuai rincian target Indikator Kinerja, capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Baubau merupakan capaian tahunan sehingga akan ada realisasi pada triwulan IV

IK13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Baubau

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan



keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan.

Tabel 16. Capaian IK 13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW II 2024	Realisasi TW II	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Baubau	0	0	0

Sesuai rincian target Indikator Kinerja, capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Baubau merupakan capaian tahunan sehingga akan ada realisasi pada triwulan IV

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Baubau pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah sebesar Rp. **3.645.714.000** (*Tiga Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah*). Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Baubau pada Triwulan II tahun 2024 mencapai Rp. **1.796,212,715** (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Belas*) atau sebesar 49.27 % (*Empat Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tujuh*). Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Baubau Triwulan II T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1. Belanja Pegawai	1,671,660,000	1,163,174,400	69.58
2. Belanja Barang	1,974,054,000	633,038,315	32.07
3. Belanja Modal	0	0	0
TOTAL	3,645,714,000	1,796,212,715	49.27



PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2024, SKIPM Baubau telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum terealisasi.

Beberapa IKU yang belum terealisasi lebih disebabkan oleh target pelaksanaannya yang bukan terealisasi pada Triwulan II melainkan pada triwulan berikutnya sesuai target IKU masing-masing..

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 13 Indikator Kinerja Utama, SKIPM Baubau tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap manual IKU untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Triwulan II SKIPM Baubau Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Baubau kepada Kepala BPPMHKP dan Menteri



Kelautan dan Perikanan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 SKIPM Baubau



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **YUNI IRAWATI WIJAYA**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ISHARTINI**
Jabatan : Plt Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Baubau

Yuni Irawati Wijaya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup SKIPM Baubau (sertifikat)	3
		2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup SKIPM Baubau(Lokasi)	2
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Baubau (produk)	10
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup SKIPM Baubau(UPI)	2
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Baubau (nilai)	84
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP				
SK3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	6	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Baubau (Indeks)	86
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Baubau	82
		8	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup SKIPM Baubau (%)	100
		9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau (%)	80
		10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	93.76
		11	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	82

		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Baubau (%)	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Baubau (%)	80

Data Anggaran

No.	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	196.900.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	206.500.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.242.314.000
Total Anggaran SKIPM Baubau Tahun 2024		3.645.714.000

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua
 Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
 Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau

Yuni Irawati Wijaya

Lampiran 2. Rincian Target Indikator Kinerja

RINCIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN 2024**

No	SS / IKU	Target							
		Tw 1	Tw 2	Sm 1	Tw 3	sd Tw 3	Tw 4	Sm 2	Tahun
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif								
	a. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	-	3	3	-	-	-	-	3
	b. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	2	-	2	2	2	-	2	2
	c. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup SKIPM Baubau (produk)						10	10	10
	d. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	2		2	2	2	2	2	2
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif								
	a. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Baubau (nilai)	84	84	84	84	84	84	84	84
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP								

a.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Baubau (Indeks)	-	-	-	-	-	86	86	86
b.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup SKIPM Baubau	-	-	-	-	-	82	82	82
c.	Presentase rekomendasi Temuan BPK Lingkup SKIPM Baubau (%)	-	-	-	-	-	100	100	100

d.	Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau (%)	80	80	80	80	80	80	80	80
e.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	-	-	-	-	-	93,76	93,76	93,76
f.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	-	-	-	-	-	82	82	82
g.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP Lingkup SKIPM Baubau (%)	-	-	-	-	-	80	80	80
h.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup SKIPM Baubau (%)	-	-	-	-	-	80	80	80

Baubau, 16 Januari 2024

Kepala



Irawati Wijaya, S.Pi, M.P
NIP.196906091998032002

Lampiran 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024



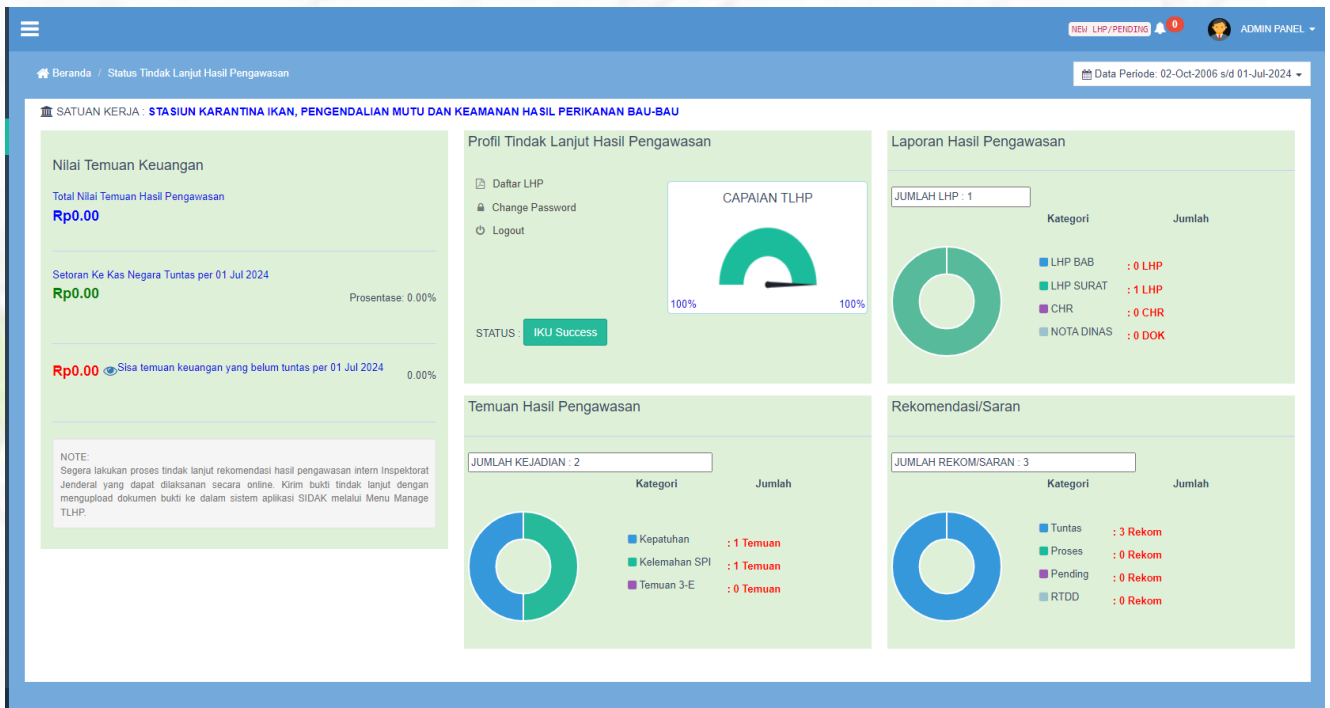
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II BAU-BAU

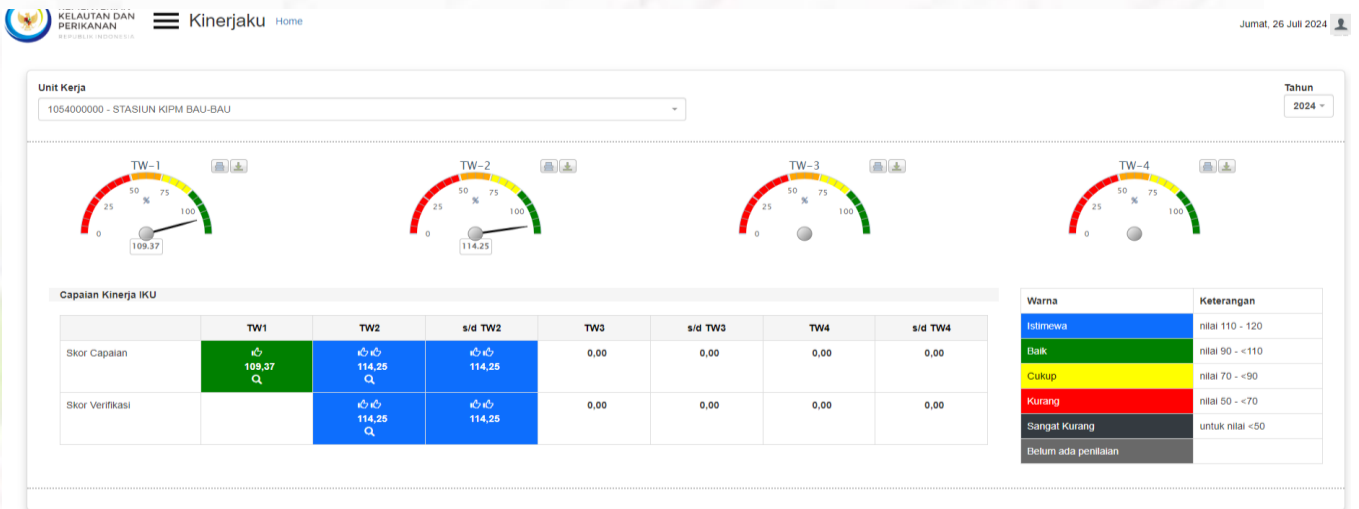
REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	649792 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAU-BAU	PAGU	1,671,660,000	1,974,054,000	0	0	0	0	0	0	0	3,645,714,000
		REALISASI	1,163,174,400 (69.58%)	633,038,315 (32.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,796,212,715 (49.27%)
		SISA	508,485,600	1,341,015,685	0	0	0	0	0	0	0	1,849,501,285
GRAND TOTAL		PAGU	1,671,660,000	1,974,054,000	0	0	0	0	0	0	0	3,645,714,000
		REALISASI	1,163,174,400 (69.58%)	633,038,315 (32.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,796,212,715 (49.27%)
		SISA	508,485,600	1,341,015,685	0	0	0	0	0	0	0	1,849,501,285

Lampiran 4. Tangkapan Layar Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada aplikasi SIDAK



Lampiran 5. Tangkapan Layar www.kinerjaku.kkp.go.id

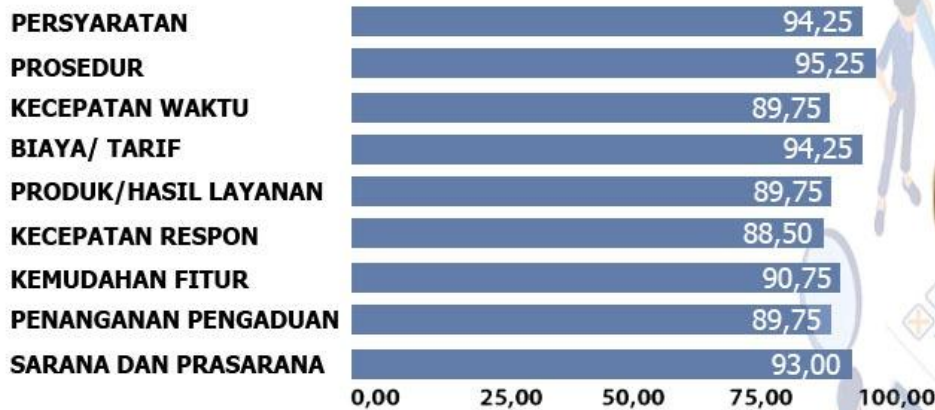




**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024 STASIUN KIPM BAUBAU



SURVEI ATAS 8 (DELAPAN) JENIS LAYANAN

1. Layanan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI)
2. Layanan Sertifikasi Surveilans HACCP
3. Layanan Sertifikasi Ekspor
4. Layanan Sertifikasi Domestik Keluar
5. Layanan Sertifikasi Domestik Masuk
6. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan
7. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL)
8. Layanan Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

22 RESPONDEN



Lampiran 7. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup SKIPM Baubau (Indeks)

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023

Silakan ketik Nama Unit Kerja [Cari](#)

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
46	STASUN KIPM BIMA	7	20.86	83.44 %	36.43	91.07 %	25	83.33 %	4.57	91.4 %	86.86	TINGGI
47	STASUN KIPM TAHUNA	12	21	84 %	37.02	92.55 %	22.92	76.4 %	5	100 %	85.94	TINGGI
48	STASUN KIPM BALU-BAU	11	20.82	83.28 %	39.09	97.73 %	25	83.33 %	5	100 %	89.91	TINGGI
49	STASUN KIPM MERAH	11	20.73	82.92 %	31.23	78.08 %	25	83.33 %	5	100 %	81.95	TINGGI
50	STASUN KIPM MAMLUU	11	21.27	85.08 %	34.4	86 %	25	83.33 %	5	100 %	85.67	TINGGI
51	BALAJUJI STANDAR KIPM	22	20.5	82 %	37.48	93.7 %	25	83.33 %	5	100 %	87.98	TINGGI

< 1 2 3 >

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023

Silakan ketik NIP atau Nama F [Cari](#) [Download](#)

#	Nama	Kualifikasi				Kompetensi				Kinerja			Disiplin			TOTAL	Keterangan	
		Tingkat Pendidikan	IP	Presentase	Diklatpim	Diklat Fungsional	Diklat 20 JP	Seminar	IP	Presentase	Predikat Kinerja	IP	Presentase	Hukuman Disiplin	IP			Presentase
1	YUNI IRAWATI WIJAYA	S-2	23	92 %	15	-	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	93	SANGAT TINGGI
2	ABDUL SYUKUR YASIN	S-2	23	92 %	-	15	15	0	30	75 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	83	TINGGI
3	SITI MARLINA KADIR	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
4	ALEXANDER WICAKSONO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
5	SUPRIADI	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
6	BAMBANG S	D-III	21	84 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI
7	NI KADEK WRATI	D-III/ISMA	20	80 %	-	-	22.5	17.5	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
8	RIKI PURNOMO	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
9	SAPTARI JOAN TATRA	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
10	I PUTU SUGIASA	S-1	20	80 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	90	TINGGI
11	RATNA DEWI	D-III	21	84 %	-	15	15	10	40	100 %	BAK	25	83.33 %	0	5	100 %	91	SANGAT TINGGI

< >

Lampiran 8. Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS II BAU-BAU

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	103	032	649792	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU	Nilai	100.00	72.44	92.32	100.00	100.00	99.48	95.88	93.25	100%	0.00	93.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.87	18.46	10.00	10.00	9.95	23.97				
					Nilai Aspek	86.22		97.95				95.88				

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 03-07-24 12:43:34 oleh : 649792